



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta paralel khususnya yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini.

Malinau, 27 Juli 2023

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepala Dinas,

Juara Lakat, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19660622 200312 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA	3
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	15
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	15
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	16
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	24
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	25
3.2 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN PROPINSI.....	25
3.3 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN KABUPATEN... ..	26
3.4 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	26
3.5 PROGRAM DAN KEGIATAN	32
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
 BAB V PENUTUP	48



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.....	7
Tabel 2.2.....	18
Tabel 2.3	24
Tabel 3.1	28
Tabel 3.2	34
Tabel 4	44

DAFTARGAMBAR

Gambar 3.1.....	27
Gambar 3.2.....	28
Gambar 3.3.....	29
Gambar 3.4.....	30
Gambar 3.5.....	31



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Renja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau sebagai satuan perangkat daerah akan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan



RENJA DPM.PTSP 2024

yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Periode tahun 2021 – 2026 Yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL“.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan perannya, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau Tahun 2021 - 2026 yang masih mengacu pada Renstra sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang cepat, mudah, tepat dan transparan kepada masyarakat sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku;
2. Pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas, trampil dan profesional dalam memberikan pelayanan perizinan dan informasi investasi /penanaman modal daerah;
3. Mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perizinan serta penerapan kerjasama penanaman modal/ investasi;
4. Pemberian advokasi dan kepastian hukum kepada mesyarakat maupun investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Malinau;
5. Melakukan penelitian, pengkajian dan pengolahan data dalam rangka menggali potensi investasi daerah untuk kesejahteraan masyarakat;
6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan, penanaman modal dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan hidup serta sumberdaya alam;
7. Investasi daerah melalui media cetak dan media elektronik;
8. Membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang manfaat perizinan usaha;
9. Pengembangan kerjasama penanaman modal yang bertumpu pada potensi sumberdaya alam meliputi sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, perikanan, pertambangan dan energi, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, untuk menjadi pedoman dan motivasi para aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan sebagai pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian



RENJA DPM.PTSP 2024

sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
15. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



RENJA DPM.PTSP 2024

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Permendagri Nomor 050-.... Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagai landasan Hukum penyusunan Renja OPD;
19. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/91.Abapp.litbang.V/2016 perihal penyusunan rancangan renstra SKPD tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan dibidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan strategi, arah kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang telah disepakati, sehingga seluruh upaya yang dilaksanakan bersifat sinergi, koordinatif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih tajam;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Mengarahkan semua bidang menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran
4. Merupakan komitmen terhadap program-program yang akan dilaksanakan

1.4. Sistematika Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum,



Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renja SKPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah dibentuk dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci). Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD. Dampak terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan Peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2023 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diarahkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan hak dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,



RENJA DPM.PTSP 2024

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrengbang Kecamatan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu permasalahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan penjabaran Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2022 ditentukan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kerja tahun bersangkutan juga dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran telah direalisasikan dalam 5 program dan 15 kegiatan, antara lain :

1. Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan;
2. Dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut berakibat langsung dengan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau selama tahun 2022 dan pencapaian renstra, pada tabel dibawah ini :



RENJA
DPM.PTSP 2024

Tabel .2.1
Evaluasi Renja Tahun 2022

Evaluasi Terhadap RKPD
Kabupaten Malinau
Tahun 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT																														
No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Akhir Tahun RPJM/Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJM/Renstra sampai dengan Tahun sebelumnya		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJM/Renstra s/d i Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		17	18		
		2																												
		2	18																											
	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN/PMA	2	18	05																							Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		2	18	05	2.01																									
1		2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Laporan	Rp. 60.631.000	0 Laporan	Rp. 0	5 Laporan	Rp. 60.631.000	0 Laporan	Rp. 0	0 Laporan	Rp. 0	5 Laporan	Rp. 24.240.000	5 Laporan	Rp. 24.240.000	100,00 %	39,98 %	5 Laporan	Rp. 24.240.000	0,00 %	39,98 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Anggaran yang tidak terserap yaitu Honorarium Narasumber dan transportasi, 2. penyelesaian permasalahan bagi pelapor yang melaporkan hanya pelaku usaha kecil.
2		2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi/Bimtek Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Moda	0 kegiatan	Rp. 215.383.000	0 kegiatan	Rp. 0	2 kegiatan	Rp. 215.383.000	0 kegiatan	Rp. 0	0 kegiatan	Rp. 0	2 kegiatan	Rp. 191.280.985	2 kegiatan	Rp. 191.280.985	100,00 %	88,81 %	2 kegiatan	Rp. 191.280.985	0,00 %	88,81 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kegiatan yang dilaksanakan 4 hari dapat terlaksana hanya dalam 3 hari dengan target 2 kegiatan (202 pelaku usaha) sehingga masih ada dana yang tidak terserap
3		2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Laporan	Rp. 107.900.000	0 Laporan	Rp. 0	2 Laporan	Rp. 107.900.000	0 Laporan	Rp. 0	1 Laporan	Rp. 0	1 Laporan	Rp. 35.798.800	2 Laporan	Rp. 35.798.800	100,00 %	33,18 %	2 Laporan	Rp. 35.798.800	0,00 %	33,18 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Target Pengawasan dalam kota tercapai sedangkan sasaran pengawasan ke wilayah kecamatan pujungan bahu hulu yang menyerap anggaran cukup besar tidak dapat dilaksanakan sehubungan perubahan standar transportasi setelah dihapuskannya kenaikan harga BBM
Rata-rata capaian kinerja (%)											0	0	0	0	16,67	0	83,99	53,99			100	53,99			0	53,99		2022		
Predikat kinerja																														
		X																												
		X	XX																											



RENJA
DPM.PTSP 2024

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	0 %	Rp. 3.835.900.809		Rp. 0	100 %	Rp. 3.835.900.809		Rp. 654.355.791		Rp. 878.176.075		Rp. 1.210.610.978		Rp. 1.195.239.747		Rp. 3.938.382.591		Rp. 3.938.382.591					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																									
4		X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	31 orang	Rp. 3.977.744.428	0 orang	Rp. 0	36 orang	Rp. 3.977.744.428	26 orang	Rp. 654.355.791	31 orang	Rp. 862.626.075	31 orang	Rp. 1.079.775.960	34 orang	Rp. 1.051.467.265	34 orang	Rp. 3.648.225.091	94,44 %	91,72 %	34 orang	Rp. 3.648.225.091	109,68 %	91,72 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Adanya keluar dan masuknya pegawai yang baru (Mutasi) dan bertambahnya pagu anggaran pada waktu perubahan anggaran dan pagu anggaran yang di berikan lebih sehingga realisasi keuangan tidak mencapai 100%
		X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																									
5		X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170 buah	Rp. 150.000.000	0 buah	Rp. 0	34 buah	Rp. 150.000.000	0 buah	Rp. 0	31 buah	Rp. 0	3 buah	Rp. 100.128.000	0 buah	Rp. 49.872.000	34 buah	Rp. 150.000.000	100,00 %	100,00 %	34 buah	Rp. 150.000.000	20,00 %	100,00 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
6		X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Exemplar	Rp. 8.043.900	0 Exemplar	Rp. 0	2 Exemplar	Rp. 8.043.900	0 Exemplar	Rp. 0	0 Exemplar	Rp. 0	2 Exemplar	Rp. 0	0 Exemplar	Rp. 8.043.900	2 Exemplar	Rp. 8.043.900	100,00 %	100,00 %	2 Exemplar	Rp. 8.043.900	20,00 %	100,00 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7		X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 kali	Rp. 122.121.600	0 kali	Rp. 0	22 kali	Rp. 122.121.600	0 kali	Rp. 0	8 kali	Rp. 15.550.000	4 kali	Rp. 30.707.018	10 kali	Rp. 75.864.582	22 kali	Rp. 122.121.600	100,00 %	100,00 %	22 kali	Rp. 122.121.600	36,67 %	100,00 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									

8		X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 Bulan	Rp. 9.992.000	0 Bulan	Rp. 0	3 Bulan	Rp. 9.992.000	0 Bulan	Rp. 0	0 Bulan	Rp. 0	2 Bulan	Rp. 0	1 Bulan	Rp. 9.992.000	3 Bulan	Rp. 9.992.000	100,00 %	100,00 %	3 Bulan	Rp. 9.992.000	20,00 %	100,00 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
9		X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	35 Unit	Rp. 9.840.000	0 Unit	Rp. 0	7 Unit	Rp. 9.840.000	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	0 Unit	Rp. 0	0,00 %	0,00 %	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pihak rekanan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tidak menyanggupi dalam melaksanakan pemeliharaan, sesuai pagu anggaran yang ada sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan



2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Malinau;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 tahun 2016 kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan terpadu yang meliputi promosi dan penggalan potensi penanaman modal, pengendalian dan kerjasama penanaman modal, perijinan dan produktivitas kerja;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut :



I. Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sbb :

1. Tugas pokok kepala Dinas adalah membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang, Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
2. Fungsi Kepala Dinas :
 - Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1. Tugas pokok : Memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan.
2. Fungsi :
 - penyelenggaraan penyusunan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
4. Penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;



5. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretaris DPMPSTSP dibantu oleh :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Penyusunan Program, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas.
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset yang mempunyai tugas pokok : melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan aset, merencanakan anggaran, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset dinas.

III. Bidang Pelayanan Perijinan.

Bidang Pelayanan Perijinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan, pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi.

Fungsi :

- Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;
- Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;
- Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;



RENJA DPM.PTSP 2024

- Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;
- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;
- Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan di bidang pelayanan dan informasi, perizinan dan penetapan serta pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan dibantu oleh :

1. Seksi Pelayanan dan Informasi

Seksi Pelayanan dan Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi.

2. Seksi Perizinan dan Penetapan

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas pokok Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi



dan pelaporan di bidang perizinan dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Seksi Pengaduan Masyarakat, Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, memiliki tugas pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan masyarakat, data dan sistem informasi

IV. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas

1. Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal.
2. Fungsi :
 - Penyiapan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal;
 - Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal;
 - Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal;
 - Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal;
 - Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal;



- Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal;
- Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang promosi dan kerjasama, pengendalian dan evaluasi, dan pengembangan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan dibantu oleh :

1. Seksi Promosi dan Kerjasama

Seksi Bidang Promosi dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Seksi Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Tugas pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama

2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi

Seksi Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Tugas pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi

3. Seksi Pengembangan Penanaman Modal

Seksi Pengembangan penanaman modal dipimpin oleh Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal yang mempunyai tugas pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal.



2.3. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan kinerja perlu dilakukan suatu analisis kinerja pelayanan yang menyeluruh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagaimana dituangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang telah mengubah pola perencanaan, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi bahwa pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan belum terlaksana secara optimal. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD, tersebut adalah :

2.3.1. Bidang Penanaman Modal

1. Masih belum tersusunnya Regulasi yang mengatur tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Insentif bagi Penanaman modal daerah kabupaten/Kota



2. Belum tersusunnya regulasi Pemberian insentif kepada Pelaku usaha
3. Belum tersusunnya Peta Potensi Investasi yang menjadi gambaran bagi investor untuk melakukan Investasi di daerah.
4. Belum tersusunnya strategi Promosi
5. Masih terdapat Sarana dan Prasarana infrastruktur yang kurang memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang Investor masuk ke Kabupaten Malinau.
6. Perlunya pengendalian dan pengawasan penanaman modal yang dilakukan secara rutin mengenai Penanaman Modal untuk promosi potensi investasi dan keberadaan perusahaan.
7. Perlunya peningkatan pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pelayanan dibidang Penanaman Modal;

2.3.2. Bidang Perizinan

1. Perlunya peningkatan pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) dalam pelayanan dibidang Perizinan;
2. Perlunya penambahan kuota jaringan internet dalam mendukung pelayanan publik secara online;
3. Perlunya survey Lapangan dan pendataan yang dilakukan secara rutin sebagai syarat kelengkapan penerbitan izin (IMB,SITU,Izin Lokasi).
4. Perlunya SDM yang mampu mengelolah data berbasis system elektronik
5. Perlunya sosialisasi dan sinkronisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha melalui system pelayanan berbasis elektronik maupun bertatap muka yang berhubungan perkembangan regulasi terbaru.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program Rencana Kerja Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2024 meliputi :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program promosi Penanamana Modal
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penananaman Modal



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk tahun 2024 tidak terdapat jumlah anggaran yang signifikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah sesuai Hasil Analisis Kebutuhan.

Secara rinci perubahan atau perbedaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB.
MALINAU
TAHUN 2024**



RENJA
DPM.PTSP 2024

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Malinau

IKU/IKK/SPM/NSPK/Indikator lainnya	No.	Kode	Program (6)/ Kegiatan (10)/ Sub Kegiatan (19)			Rencana Tahun 2024 (Tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Keterangan
					Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
KENAIAKAN / PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN	1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha								
Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		2.18.02.2.01	1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/in sentif penanaman modal								
		2.18.02.2.01.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Malinau	1	219.980.000	APBD II		1	219.980.000	
		2.18.02.2.02	2	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Jumlah penyediaan dokumen RUPM dan peta potensi								



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

		2.18.02.2.02.02		4	Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Malinau	1	280.808.000	APBD II		1	280.808.000	
JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan								
Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		2.18.04.2.01	4	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		2.18.04.2.01.01		7	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Daerah	340 Pelaku usaha	187.739.000	APBD II		340 Pelaku usaha	187.739.000	
		2.18.04.2.01.02		8	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kab. Malinau	20 Kegiatan Usaha	109.821.500	APBD II		20 Kegiatan Usaha	109.821.500	



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota		2.18.04.2.01.03		9	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Malinau	7 Pelaku Usaha	122952700	APBD II		7 Pelaku Usaha	122952700	
RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											
Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		2.18.05.2.01	5	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Laporan realisasi penanam modal		2.18.05.2.01.01		11	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Malinau	6 Kegiatan Usaha	16003000	APBD II		6 Kegiatan Usaha	16003000	
Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		2.18.05.2.01.02		12	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Malinau	160 Pelaku Usaha	158118450	APBD II		198 Pelaku Usaha	158118450	



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

		2.18.05.2.01.03	13	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kab. Malinau	3 Kegiatan Usaha	19883800	APBD II		2 Kegiatan Usaha	19883800	
	5	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										
		2.18.06.2.01	6	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		2.18.06.2.01.01	14	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Malinau	5 Dokumen	Rp. 74.382.000,00	APBD II		5 Dokumen	Rp. 74.382.000,00	
	6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			7	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH										
				15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kab. Malinau	35	Rp. 4.872.396.172,00	APBD II		35	Rp. 4.872.396.172,00	Penambahan Pagu sesuai dengan Jumlah Pegawai yang ada
			8	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH										
				16	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	8 Orang	Rp. 253.025.000 ,00	APBD II		8 Orang	Rp. 253.025.000 ,00	
			9	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH										
				17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	1 Paket	Rp. 111.819.000 ,00	APBD II		1 Paket	Rp. 111.819.000 ,00	
				18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	Laporan	Rp. 281.220.000 ,00	APBD II		6 Lapora n	Rp. 281.220.000 ,00	
				19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Kab. Malinau	2 Paket	Rp. 17.048.350, 00	APBD II		2 Paket	Rp. 17.048.350, 00	
			10	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										



RENJA
DPM.PTSP 2024

				20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Malinau	3 Unit	Rp. 37.280.000 ,00	APBD II		3 Unit	Rp. 37.280.000 ,00	
				21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Malinau	7 Unit	Rp. 25.000.000 ,00	APBD II		7 Unit	Rp. 25.000.000 ,00	
						TOTAL			6.787.476.972,00				6.787.476.972,00	

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Tabel : 2.3



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan menjadi 7 prioritas daerah adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
6. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan public

3.1.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Propinsi

Adapun Program Prioritas Propinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dalah terdiri dari 9 program prioritas yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan
2. Mewujudkan Pembangunan KIPI
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan sungai, laut dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi di setiap kabupaten/kota.
4. Meningkatkan terwujudnya Konektivitas Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil dalam rangka Membangun Desa Menata Kota dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai, udara dan informasi teknologi di setiap Kabupaten/Kota
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten / kota
6. Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif setiap kabupaten/kota



**KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025**

7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan
8. Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum millennial
9. Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap Kabupaten / Kota

3.1.3 Telahaan Terhadap Kebijakan Kabupaten Malinau

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026, Visi Kepala Daerah (KDH) adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL“.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui Pemda Malinau Menetapkan Program Prioritas yaitu :

1. Penguatan Perkonomian Kabupaten Malinau dan Peningkatan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Daya Saing SDM melalui Inovasi dan Peningkatan Kualitas SDM
3. Menurunkan Angka Kemiskinan
4. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar untuk Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
7. Menciptakan Suasana Kondusif yang mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Sesuai perencanaan Strategis Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

1. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malinau;
2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur di bidang penanaman modal dan perijinan;
3. Menarik minat Investor dan penanaman modal (PMA dan PMDN);
4. Meningkatkan Pelayanan prima melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
5. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) kearah aparatur yang professional, jujur dan akuntabel;



6. Tersusunnya database dan system informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Malinau.

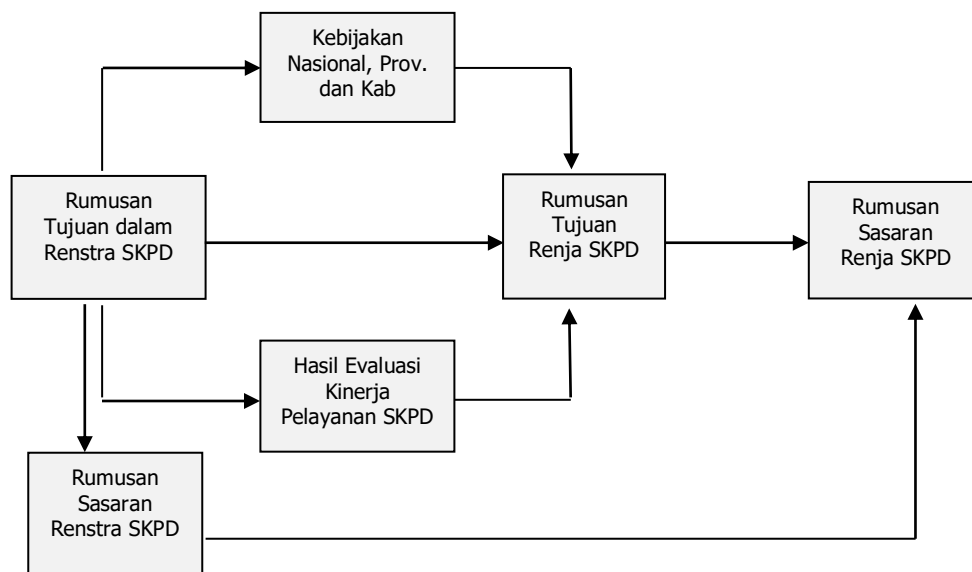
3.2.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau antara lain :

1. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malinau;
2. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani para investor dan pembuat izin;
3. Meningkatnya layanan perijinan melalui PTSP;
4. Memberikan kemudahan kepada Investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan;
5. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya.

Rumusan sasaran tersebut, sajikan dalam bentuk pernyataan. Langkah perumusan tujuan dapat digambarkan sebagai berikut :

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH



Gambar : 3.1

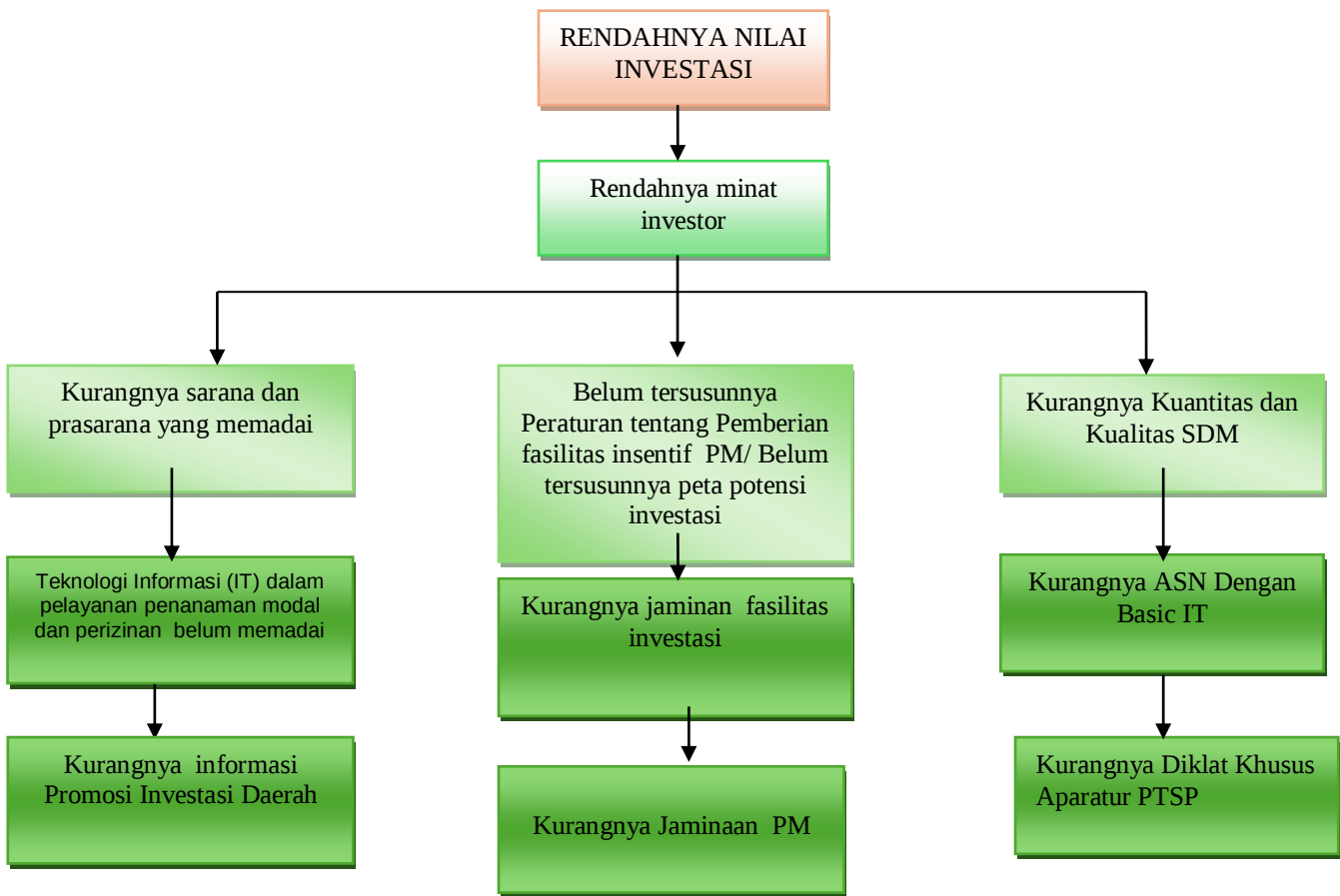


KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Nilai invetasi	Sarana dan prasarana penunjang investasi belum memadai	Belum tersedianya Rancangan Umum Penanaman Modal (RUPM) & Peta Potensi
		Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan belum memadai	Kurangnya ASN dengan basic Teknologi Informasi Kurang tersedianya Diklat Khusus PTSP
2	Belum Optimalnya pelayanan perizinan sesuai standart pelayanan publik	Sarana pelayanan perizinan OSS belum sesuai standar	kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia

Tabel : 3.1

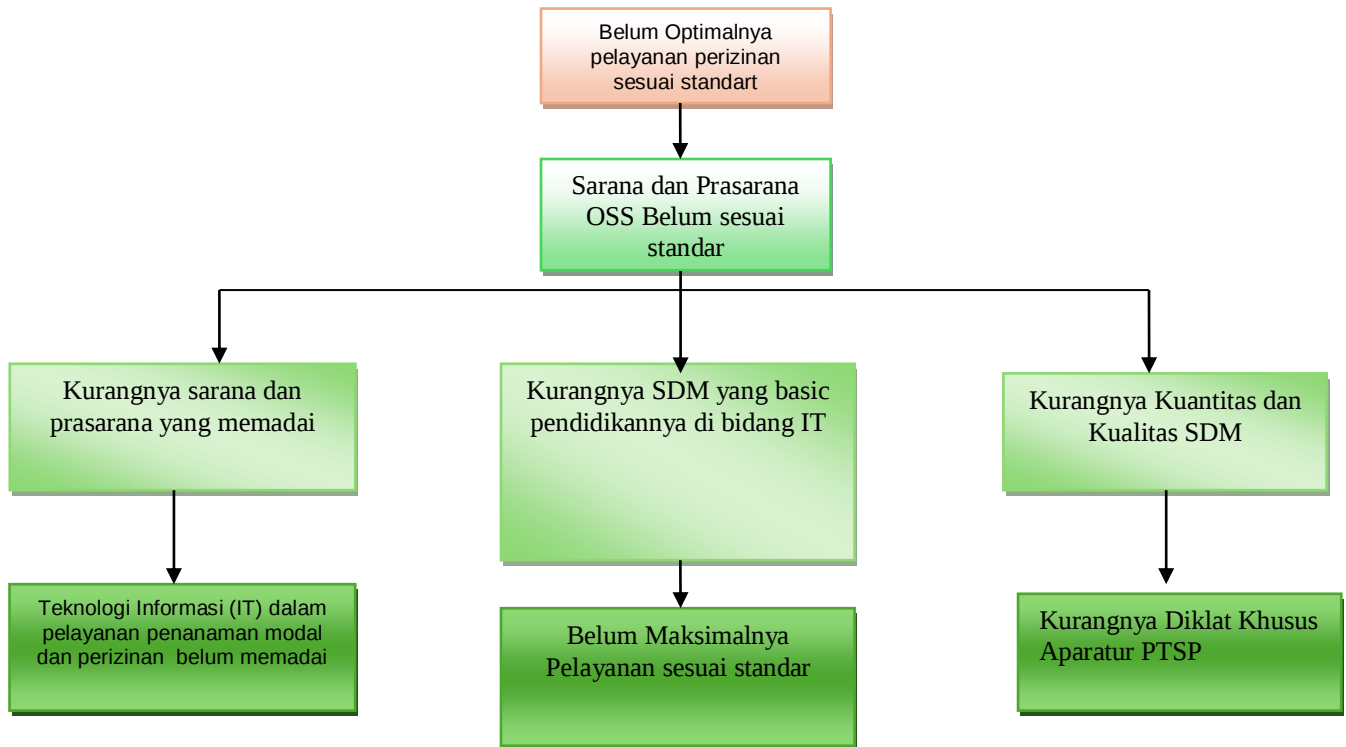
POHON MASALAH



Gambar : 3.2

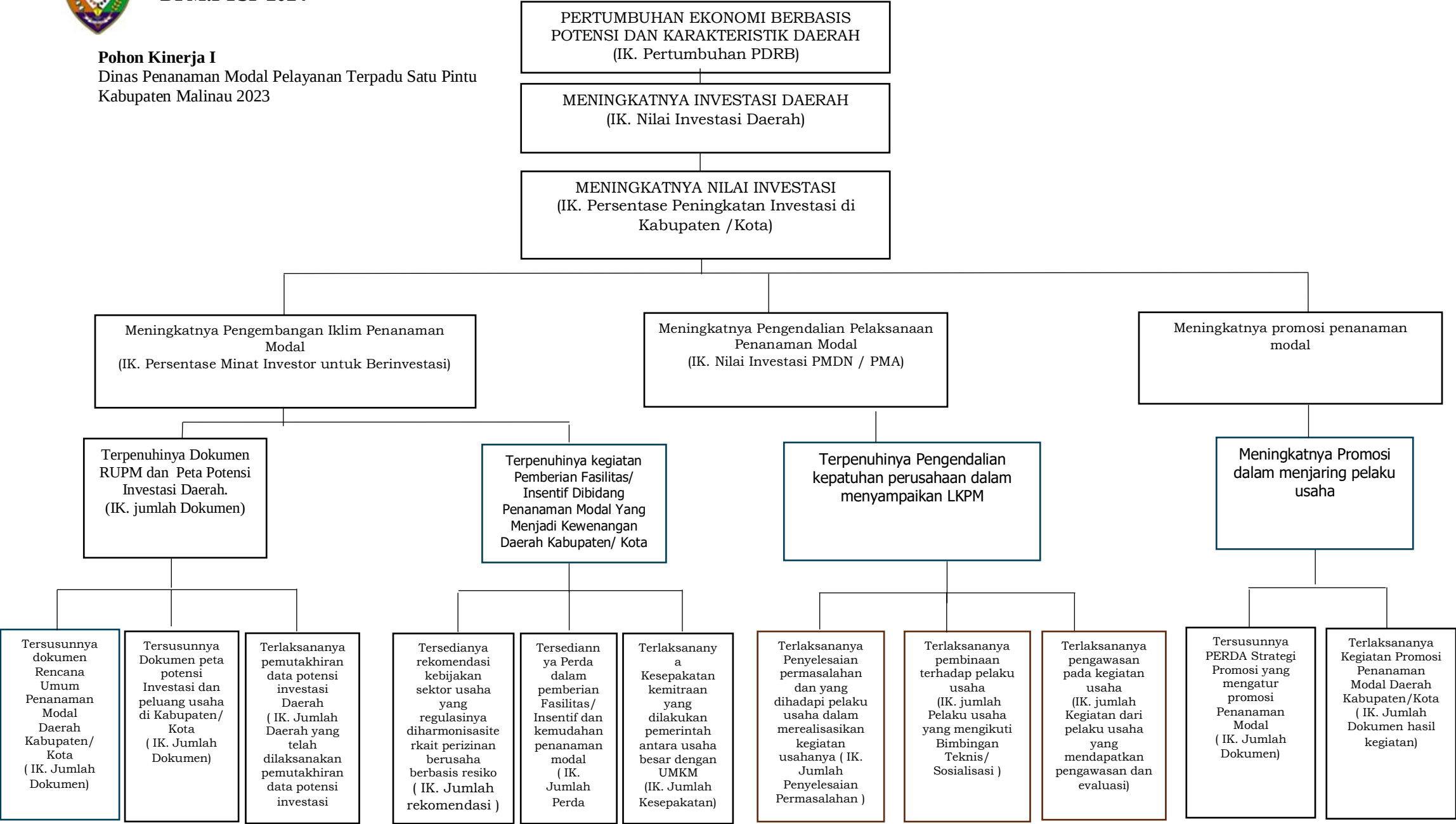


Gambar : 3.3





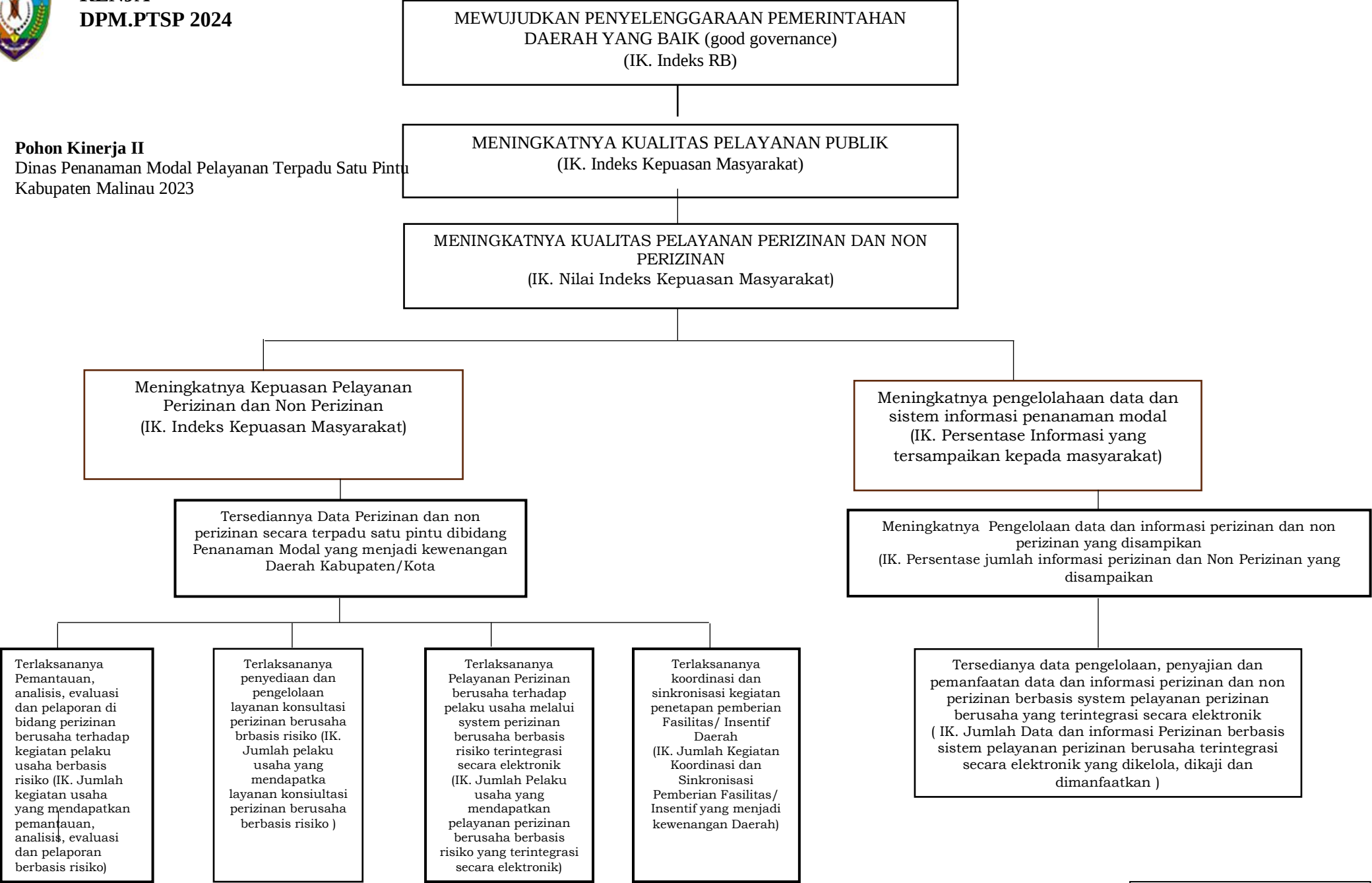
Pohon Kinerja I
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malinau 2023



Gambar : 3.4 Pohon Kinerja



Pohon Kinerja II
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Malinau 2023



Gambar : 3.5 Pohon Kinerja



3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/ kota
 - ✓ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota

Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - ✓ Sub Kegiatan Pemantauan ,analisis Evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis Risiko

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- b. Kegiatan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya.
 - ✓ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha;
 - ✓ Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi



RENJA
DPM.PTSP 2024

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 mencakup 5 Program, 8 Kegiatan dan terdiri 16 Sub kegiatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ;



Tabel.3.3.
Rencana Awal

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Malinau

IKU/IKK/SPM/NSPK/Indikator lainnya	No.	Kode	Program (6)/ Kegiatan (10)/ Sub Kegiatan (19)		Rencana Tahun 2024 (Tahun rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Keterangan
					Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
KENAIKIAN / PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN	1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha								
Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		2.18.02.2.01	1	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal								



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

		2.18.02.2.01.0 1		1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Malang	1	100.000.000	APBD II		1	100.000.000	
Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal'		2.18.02.2.01.0 2		2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan	Kab. Malang	1		APBD II		1		
		2.18.02.2.02		2	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Jumlah penyediaan dokumen RUPM dan peta potensi								
		2.18.02.2.02.0 1		3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang terbit								Melanjutkan penerbitan RUPM bentuk Naskah dan Perda yang di 2023 hanya baru sampai di bentuk Kajian



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

		2.18.02.2.02.02		4	Penyediaan Peta Potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab. Malinau	1	150.000.000	APBD II		1	150.000.000	
JUMLAH NILAI INVESTASI BERSEKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Persentase Minat Investor untuk Berinvestasi								
Kegiatan Pameran Penanaman Modal		2.18.03.2.01	3	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah pelaku usaha yang terjaring								
Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		2.18.03.2.01.01		5	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen	100.000.000	APBD II		1 Dokumen	100.000.000	
		2.18.03.2.01.02		6	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dalam dan Luar Daerah	1 Dokumen Kegiatan	135.699.156	APBD II		1 Dokumen Kegiatan	135.699.156	
JUMLAH INVESTOR BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan								



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		2.18.04.2.01	4	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		2.18.04.2.01.01	7	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dalam dan Luar Daerah	340 Pelaku usaha	150.000.000	APBD II		340 Pelaku usaha	150.000.000		
		2.18.04.2.01.02	8	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Malang	20 Kegiatan Usaha	110.000.000	APBD II		20 Kegiatan Usaha	110.000.000		



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota		2.18.04.2.01.03	9	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Malinau	7 Pelaku Usaha	25.508.371	APBD II		7 Pelaku Usaha	25.508.371	
		2.18.04.2.01.04	10	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Malinau	4 Kegiatan Usaha	20.000.000	APBD II		4 Kegiatan Usaha	20.000.000	
RASIO DAYA SERAP TENAGA KERJA	4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		2.18.05.2.01	5	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Laporan realisasi penanam modal		2.18.05.2.01.01	11	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malinau	5 Kegiatan Usaha	16.013.354	APBD II		5 Kegiatan Usaha	16.013.354	
Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		2.18.05.2.01.02	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malinau	198 Pelaku Usaha	161.244.000	APBD II		198 Pelaku Usaha	161.244.000	
		2.18.05.2.01.03	13	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Malinau	2 Kegiatan Usaha	20.000.000	APBD II		2 Kegiatan Usaha	20.000.000	
	5	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

		2.18.06.2.01	6	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA									
		2.18.06.2.01.01	14	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Sistem Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kab. Malinau	5 Dokumen	86.521.622	APBD II		5 Dokumen	86.521.622	
	6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										



**RENJA
DPM.PTSP 2024**

Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota			7	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
			15	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malinau	35	3.907.357.679	APBD II		35	3.907.357.679	Penambahan Pagu sesuai dengan Jumlah Pegawai yang ada
			8	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
			16	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	8 Orang	77.198.106	APBD II		8 Orang	77.198.106	
			9	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
			17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	1 Paket	90.000.000	APBD II		1 Paket	90.000.000	



RENJA
DPM.PTSP 2024

				1 8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan Luar Daerah	6 Laporan	162.390.105	APBD II		6 Laporan	162.390.105	
				1 9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Malina u	2 Paket	17.048.929	APBD II		2 Paket	17.048.929	
			1 0	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
				2 0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Malina u	3 Unit	40.000.000	APBD II		3 Unit	40.000.000	



RENJA
DPM.PTSP 2024

				2 1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Malinau	7 Unit	25.000.000	APBD II		7 Unit	25.000.000	
						T O T A L			5.393.981.322				5.393.981.322	



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi serta kebijakan yang telah diuraikan di depan, disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Target capaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024

Rencana Program dan Kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024 dan program prioritas beserta pendanaan indikatif seperti terlihat pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel .4.
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Kode	Program (6)/ Kegiatan (10)/ Sub Kegiatan (19)	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	LOKASI	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)
2	3	4	5	6	7	8
1	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha			
	2.18.02.2.01	1 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah kegiatan penetapan kebijakan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal			
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas Insentif	Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	Kab. Malinau	1 Perda	219.980.000
	2.18.02.2.02	2 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	Jumlah penyediaan dokumen RUPM dan peta potensi			
	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Peta Potensi Penanaman Modal	Jumlah Perda yang diterbitkan	Kab.Malinau	1 Dokumen	280.808.000
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi			
3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan			
	2.18.04.2.01	4 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	Jumlah data Perizinan dan Penanaman modal			



RENJA
DPM.PTSP 2024

		KABUPATEN/KOTA					
	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Malinau	340 Pelaku Usaha	187.739.000
	2.18.04.2.01.0007		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	Kabupaten Malinau	7 Pelaku Usaha	122.952.700
	2.18.04.2.01.0008		Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	Kabupaten Malinau	20 Kegiatan Usaha	109.821.500,00
4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN			
	2.18.05.2.01	5	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan LKPM			
	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</i>	Kab. Malinau	6 Kegiatan Usaha	16.003.000
	2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	Kab. Malinau	160 Pelaku Usaha	161.244.000,
	2.18.05.2.01.0005		Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan usaha yang dilakukan pengawawssan</i>	Kab. Malinau	3 Kegiatan Usaha	20.000.000



RENJA
DPM.PTSP 2024

5	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat			
	2.18.06.2.01	6 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah informasi perijinan dan Non perijinan yang disampaikan			
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	Kab. Malinau	5 Dokumen	75.465.000
6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran			
		7 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan	Kab. Malinau	33 Orang	4872396172
		8 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan			
		Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	14 Orang	253025000
		9 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Peningkatan Pelayanan Aparatur, Administrasi Perkantoran dan Perencanaan			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Malinau	2 Paket	111819000
		Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan	Kab. Malinau	20	281220000



RENJA
DPM.PTSP 2024

			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Malinau	2 Paket	17048350
		10	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Aset Daerah			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Malinau	3 Unit	37280000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Malinau	11 Unit	25.000.000
						TOTAL	6.787.476.972,00



BAB V PENUTUP

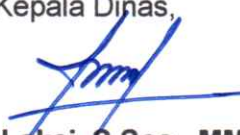
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten serta target dari sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2024 dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2024 merupakan Dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja tahun 2024 dengan efektif dan efisiensi.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja tahun 2024;
3. Tata cara penyusunan Renja tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rancana kerja pemerintah daerah;

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2024.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kepala Dinas,


Juara Lakai, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I, IV/b
Nip. 19660622 200312 1 001